

Peluang Pemandu Wisata sebagai Alternatif Pekerjaan Tambahan bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Syamsul Arifin¹⁾, Nurdody Zakki²⁾, Imam Hidayat³⁾, Wilda Rasaili⁴⁾, Nur Inna Alfiah⁴⁾

^{1,3,4,5)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura

¹⁾Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Wiraraja Madura

E-Mail : syamsularifin@wiraraja.ac.id)**

Abstrak

Peluang untuk berprofesi sebagai pemandu wisata menawarkan alternatif pekerjaan tambahan yang strategis bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Namun, pengembangan peluang ini memerlukan dukungan kebijakan yang tepat guna mengatasi hambatan administratif, termasuk perizinan kerja untuk profesi tambahan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang profesi pemandu wisata sebagai opsi pekerjaan tambahan bagi PMI di Malaysia. Manfaat pengabdian masyarakat ini adalah untuk membuka peluang bagi PMI memperoleh penghasilan tambahan diluar pekerjaan utamanya sebagai pekerja migran di Malaysia. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk proses pembelajaran dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, serta menghasilkan pengetahuan ilmiah. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikelompokkan kepada tiga pembahasan utama yang *petama* status legal secara hukum PMI, karena hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memperluas akses PMI ke berbagai peluang ekonomi. *Kedua* pentingnya memahami peraturan yang berlaku dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut dalam rangka menunjang kepada pengembangan profesi tambahan ini. Pengetahuan yang mendalam mengenai profesi ini menjadi landasan untuk menciptakan pekerjaan yang aman dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan keterampilan jangka panjang. *Ketiga* yaitu pentingnya kemampuan komunikasi yang efektif, yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan, memperluas jaringan profesional, dan mengembangkan keterampilan. Dengan memanfaatkan keterampilan ini, PMI dapat menciptakan pengalaman wisata yang berkesan bagi wisatawan, sekaligus memperkuat reputasi mereka di sektor pariwisata.

Kata kunci: Pekerja migran Indonesia, Peluang pemandu wisata, alternatif pekerjaan tambahan

Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia memegang peranan strategis dalam mendukung kesejahteraan keluarga mereka sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Remitansi yang dikirimkan oleh PMI menjadi salah satu pendorong utama

peningkatan pendapatan keluarga di Indonesia dan menjadi sumber devisa penting bagi negara (Wahyuni & Ardiyani, 2020). Data dari Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa kontribusi remitansi pekerja migran terhadap perekonomian nasional terus meningkat setiap tahunnya,

mencerminkan peranan krusial PMI dalam mendukung stabilitas ekonomi.

Namun demikian, kehidupan PMI di Malaysia kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk tekanan kerja yang tinggi dan terbatasnya akses terhadap pengembangan diri serta peluang pekerjaan tambahan. Rahmawati dan Nugraha (2022) mengidentifikasi bahwa PMI sering mengalami kendala sosial dan ekonomi, seperti kurangnya dukungan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Perlindungan hukum juga menjadi isu penting, sebagaimana disoroti oleh Sukanto (2021), yang menekankan perlunya kebijakan yang lebih proaktif untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Peluang menjadi pemandu wisata muncul sebagai salah satu opsi strategis bagi PMI di Malaysia. Malaysia, dengan sektor pariwisatanya yang berkembang pesat, menjadi destinasi utama di Asia Tenggara, menarik jutaan wisatawan internasional setiap tahun (Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, 2023). PMI memiliki potensi besar untuk mengisi kebutuhan ini, terutama karena keunggulan mereka dalam memahami budaya dan bahasa. Profesi pemandu wisata tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi PMI untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, memperluas jaringan profesional, serta mempromosikan

budaya Indonesia kepada wisatawan internasional.

Namun, pengembangan peluang ini membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kendala administratif, seperti perizinan kerja untuk profesi tambahan. Waktu dan tenaga PMI yang terbatas untuk mengikuti pelatihan juga menjadi tantangan, sehingga diperlukan program yang fleksibel dan terintegrasi. Selain itu, sektor pariwisata perlu menjadi lebih inklusif, memberikan peluang setara bagi pekerja migran untuk berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait pekerjaan layak, pengurangan ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi (United Nations, 2023).

Pengalaman sebagai pemandu wisata dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang berharga bagi PMI, baik selama bekerja di Malaysia maupun saat kembali ke Indonesia. Dengan pengalaman ini, mereka dapat memulai usaha di sektor pariwisata, seperti membuka agen perjalanan, mengelola homestay, atau mempromosikan destinasi lokal di kampung halaman mereka (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2023).

Dengan demikian, pengembangan profesi pemandu wisata bagi PMI di Malaysia tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi pemberdayaan

yang berkelanjutan. Langkah ini dapat memperkuat identitas, keterampilan, dan kontribusi sosial PMI, sekaligus mempromosikan diplomasi budaya Indonesia secara informal. Kegiatan seperti ini penting dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang pariwisata (Arifin et al., 2024).

Pentingnya Status Resmi PMI

Status resmi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan elemen fundamental yang menentukan akses dan peluang untuk berpartisipasi dalam profesi tambahan, termasuk sebagai pemandu wisata, di Malaysia. Keberadaan status legal tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga legitimasi yang memperluas akses PMI terhadap berbagai peluang ekonomi. Menurut Sukamto (2021), status legal memungkinkan PMI bekerja sesuai regulasi ketenagakerjaan di Malaysia, menghindarkan mereka dari risiko hukum seperti deportasi, denda, atau sanksi lainnya, yang sering dihadapi pekerja tidak berdokumen.



Dalam konteks profesi pemandu wisata, status resmi merupakan prasyarat utama untuk memperoleh izin kerja tambahan. Izin ini hanya dapat diajukan oleh pekerja dengan dokumen legal, yang mempermudah proses administratif serta memastikan PMI dapat menjalankan pekerjaan tambahan secara aman dan legal. Selain itu, status resmi membuka peluang bagi PMI untuk mengikuti program pelatihan dan sertifikasi profesional, seperti keterampilan komunikasi, pengetahuan tentang destinasi wisata, dan manajemen kelompok wisata (Fauzi & Setiawan, 2021). Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi tetapi juga daya saing PMI di sektor pariwisata.

Akses terhadap program pemberdayaan juga lebih terjamin bagi PMI dengan status resmi. Status legal sering kali menjadi syarat utama bagi pekerja migran untuk

mendapatkan akses ke pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau sektor swasta. Dengan demikian, PMI memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas diri mereka dan memanfaatkan peluang kerja tambahan di sektor pariwisata.

Kepercayaan dan kredibilitas adalah aspek penting dalam industri pariwisata. Status resmi memberikan legitimasi kepada PMI untuk bekerja sebagai pemandu wisata, sehingga meningkatkan kepercayaan dari wisatawan, agen perjalanan, dan otoritas lokal. Kredibilitas ini memperkuat hubungan profesional PMI dengan mitra industri seperti operator tur, hotel, atau atraksi wisata, yang umumnya lebih memilih bekerja sama dengan individu berstatus legal (Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, 2023).

Selain manfaat ekonomi, status resmi juga menjamin perlindungan sosial dan hak ketenagakerjaan. PMI dengan status legal berhak atas akses terhadap asuransi kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, dan tunjangan lainnya, yang sangat penting mengingat profesi pemandu wisata sering kali melibatkan mobilitas tinggi (ILO, 2022). Perlindungan ini memberikan rasa aman bagi PMI, sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif.

Pengakuan pengalaman kerja sebagai pemandu wisata juga menjadi keuntungan

tambahan bagi PMI yang memiliki status resmi. Pengalaman ini tidak hanya menjadi modal ekonomi tetapi juga sosial, memungkinkan mereka untuk memulai usaha di sektor pariwisata saat kembali ke Indonesia, seperti mengelola homestay, membuka agen perjalanan, atau mempromosikan destinasi wisata lokal (Pearce, 2008). Status resmi memastikan pengalaman tersebut tercatat dan diakui secara formal, mendukung pengembangan karir jangka panjang mereka.

Selain itu, status resmi mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi negara penempatan, yang membantu memperkuat citra positif PMI di mata masyarakat lokal. Dalam profesi pemandu wisata, di mana PMI sering berperan sebagai duta budaya informal, status resmi meningkatkan pengakuan dan penghormatan terhadap kontribusi mereka. Hal ini juga memperkuat peran PMI dalam diplomasi budaya, memungkinkan mereka untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada wisatawan internasional. Dengan demikian, status resmi PMI tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan keterampilan, penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan, dan penguatan diplomasi budaya. Upaya untuk meningkatkan status legal PMI harus menjadi prioritas, baik melalui penyediaan layanan administrasi yang lebih mudah

maupun penguatan perlindungan hukum dan sosial. Pendekatan ini akan mendukung PMI dalam memanfaatkan peluang ekonomi tambahan secara optimal, sembari memperkuat posisi mereka sebagai bagian integral dari komunitas global.

Memahami peraturan

Pemahaman mendalam terhadap regulasi merupakan aspek krusial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin memanfaatkan peluang sebagai pemandu wisata di Malaysia. Profesi ini menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memberdayakan keterampilan PMI. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Malaysia memiliki kebijakan ketat terkait izin kerja, yang mensyaratkan status hukum jelas bagi setiap pekerja asing, termasuk PMI, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi menjadi langkah awal untuk memastikan legalitas dan keamanan dalam menjalankan profesi ini.



Izin Kerja Tambahan Salah satu aspek utama regulasi yang harus dipahami adalah prosedur pengajuan izin kerja tambahan. Status awal PMI biasanya hanya mengizinkan mereka bekerja dalam sektor tertentu yang tertera dalam kontrak kerja. Jika PMI ingin mengambil pekerjaan tambahan, seperti pemandu wisata, mereka diwajibkan mengajukan izin khusus kepada otoritas terkait. Proses ini memerlukan dokumen legal dan pemenuhan persyaratan administratif, yang hanya dapat dipenuhi oleh PMI dengan status resmi. Memahami prosedur ini membantu PMI memastikan kegiatan mereka tetap sah dan mematuhi hukum yang berlaku (Sukamto, 2020).

Selain izin kerja, pemahaman tentang regulasi pariwisata juga esensial. Malaysia menerapkan standar ketat bagi individu yang bekerja di sektor ini, termasuk sertifikasi pemandu wisata, lisensi, dan kepatuhan terhadap kode etik. Menguasai

aturan ini tidak hanya memastikan legalitas pekerjaan, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas PMI di mata wisatawan dan pemangku kepentingan lainnya, seperti agen perjalanan dan otoritas lokal (World Tourism Organization, 2021).

Pemahaman terhadap regulasi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko hukum. Kegiatan tambahan tanpa izin dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk denda, deportasi, atau pencabutan izin kerja. Dengan mengikuti aturan yang ada, PMI dapat bekerja dengan rasa aman, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan memberikan layanan berkualitas kepada wisatawan.

Identifikasi Peluang dan Batasan Pengetahuan terhadap regulasi memungkinkan PMI mengenali peluang dan batasan dalam profesi ini. Sebagai contoh, PMI dapat mengidentifikasi destinasi wisata yang membutuhkan pemandu dengan keahlian khusus, sehingga mereka dapat merancang strategi sesuai kebutuhan pasar (Rahman & Dewi, 2021). Pengetahuan ini juga mendukung mereka dalam memasarkan layanan secara efektif kepada wisatawan lokal maupun internasional.

Dengan memahami dan mematuhi regulasi, PMI tidak hanya dapat menjalankan profesi pemandu wisata secara legal, tetapi juga

menciptakan nilai tambah bagi pengembangan diri mereka. Pengetahuan ini menjadi landasan kuat untuk menjadikan profesi pemandu wisata sebagai alternatif pekerjaan yang aman, berkelanjutan, dan mendukung peningkatan keterampilan jangka panjang. Selain itu, peran PMI sebagai pemandu wisata juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan citra Indonesia di Malaysia. Melalui pemahaman ini, PMI mampu memanfaatkan peluang di sektor pariwisata secara optimal dan berkontribusi dalam memperkuat hubungan lintas budaya.

Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Kemampuan komunikasi adalah keterampilan utama yang harus dimiliki Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memanfaatkan peluang sebagai pemandu wisata di Malaysia. Profesi ini menuntut interaksi langsung dengan wisatawan, sehingga PMI perlu mampu menyampaikan informasi secara jelas, menarik, dan efektif. Informasi tersebut mencakup pengetahuan tentang destinasi wisata, budaya lokal, sejarah, serta kemampuan menjawab pertanyaan dan menangani kebutuhan wisatawan. Menurut Schmitz (2017), komunikasi efektif membangun kepercayaan dan kenyamanan wisatawan, yang berkontribusi pada pengalaman wisata yang memuaskan.



Komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat dengan tujuan untuk memberikan informasi, menghibur, dan memengaruhi (Syafriyani et al., 2024). Kemampuan komunikasi tidak hanya meliputi penyampaian informasi, tetapi juga mendengarkan aktif. Sebagai pemandu wisata, PMI perlu memahami kebutuhan dan preferensi wisatawan, baik secara individu maupun kelompok. Dengan mendengarkan aktif, mereka dapat memberikan rekomendasi yang relevan, menangani keluhan dengan bijak, dan menciptakan pengalaman wisata yang lebih personal. Burgoon et al. (2011) menekankan bahwa mendengarkan aktif adalah elemen penting dalam membangun hubungan interpersonal, terutama dalam konteks lintas budaya seperti pariwisata internasional.

Di Malaysia, kemampuan berkomunikasi dalam berbagai bahasa, khususnya bahasa Inggris, menjadi keunggulan kompetitif. Sebagai destinasi wisata internasional, Malaysia membutuhkan pemandu wisata yang mampu berkomunikasi lintas budaya.

PMI yang fasih berbahasa Inggris memiliki peluang lebih besar untuk melayani wisatawan mancanegara. Di sisi lain, kemampuan berbahasa Melayu membantu PMI memahami dan memenuhi kebutuhan wisatawan domestik serta berinteraksi dengan masyarakat lokal (Kim & Gudykunst, 2005).

Komunikasi nonverbal, seperti sikap ramah, bahasa tubuh yang terbuka, dan kemampuan beradaptasi, juga memainkan peran penting. PMI sebagai pemandu wisata sering menjadi perwakilan pertama yang ditemui wisatawan, sehingga kesan pertama sangat bergantung pada komunikasi nonverbal. Ekman & Friesen (2003) menyatakan bahwa bahasa tubuh yang positif dapat memengaruhi interaksi lebih lanjut secara signifikan.

Kemampuan komunikasi juga penting dalam membangun jaringan profesional di sektor pariwisata. PMI dengan keterampilan komunikasi yang baik dapat berkolaborasi dengan agen perjalanan, pengelola destinasi, atau mitra bisnis untuk memperluas peluang kerja dan memperkuat posisi mereka di pasar. Kent et al. (2014) menyoroti bahwa jaringan komunikasi yang efektif membuka akses ke peluang baru dan meningkatkan kredibilitas di industri

Kemampuan komunikasi yang baik adalah fondasi keberhasilan PMI sebagai pemandu wisata. Komunikasi yang efektif tidak

hanya membantu dalam memberikan layanan berkualitas tinggi, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan keterampilan, dan memperluas jaringan profesional. Dengan memanfaatkan keterampilan ini, PMI dapat menciptakan pengalaman wisata yang berkesan bagi wisatawan, sekaligus memperkuat citra positif mereka sebagai profesional di sektor pariwisata.

Kesimpulan

Profesi pemandu wisata dapat menjadi peluang pekerjaan tambahan yang strategis bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, namun untuk mengembangkan peluang tersebut, diperlukan dukungan kebijakan yang tepat, terutama dalam mengatasi hambatan administratif dan perizinan kerja. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan oleh PMI dalam memasuki profesi ini: pertama, pentingnya status legal secara hukum untuk mendapatkan perlindungan dan akses ke peluang ekonomi; kedua, pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku guna mendukung pengembangan profesi ini secara aman dan berkelanjutan; dan ketiga, kemampuan komunikasi yang efektif, yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga membuka peluang untuk pendapatan lebih tinggi dan pengembangan keterampilan. Dengan memanfaatkan ketiga aspek ini, PMI dapat menciptakan

pengalaman wisata yang berkesan dan memperkuat reputasi mereka di sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul. Hidayat, Imam. Kurli, Anis. Rahman, Sindi Arista. Zarnuji. (2024). Literasi Media Digital Pelajar SMAN 1 Kalianget dalam Mendukung Promosi Pariwisata Kabupaten Sumenep. *Jurnal Abhakte*. 2986-2590. Volume 2, Nomor 1.
- Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2011). *Nonverbal Communication*. New York: Routledge.
- Bank Indonesia (2023). Laporan Tahunan tentang Devisa dari Remitansi Pekerja Migran Indonesia.
- Ekman, P., & Friesen, W. V. (2003). "Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues." *Communication Studies Quarterly*, 45(3), 223-237.
- Fauzi, F., & Setiawan, R. (2021). Pelatihan dan pemberdayaan pekerja migran melalui pengembangan keterampilan tambahan. *Jakarta: Gramedia*.
- International Labour Organization (ILO). (2022). Migrant workers and their rights: Ensuring legal and social protection. *Geneva: International Labour Organization*.
- Syafriyani, Ida. Suharyanto, Deny Feri. Macella, Tasya Fara. (2024). Sosialisasi Pembentukan Forum

- Anak Di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Abhakte. 2986-2590.
Volume 2, Nomor 1.
- Kim, Y. Y., & Gudykunst, W. B. (2005). Theories in Intercultural Communication. *Thousand Oaks, CA: Sage Publications*.
- Kent, M. L., Taylor, M., & White, W. J. (2014). "The Relationship Between Communication and Professional Success: A Meta-Analysis." *Journal of Applied Communication Research*, 42(2), 130-150.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pariwisata.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Panduan dan Kebijakan bagi PMI di Luar Negeri. *Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI*.
- Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia (2023). Tourism Malaysia Annual Report 2022.
- Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. (2023). Annual Tourism Statistics Report 2023. *Putrajaya: Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia*.
- Pearce, P. L. (2008). Tourist Behaviour and the Development of Tourism Experiences.
- Rahmawati, S., & Nugraha, A. (2022). Kehidupan Sosial dan Ekonomi PMI di Malaysia: Sebuah Kajian Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 8(1), 45-55.
- Rahman, A., & Dewi, L. (2021). Compliance with Labour Laws among Migrant Workers in Southeast Asia. *Asian Labour Studies Journal*, 15(3), 125–140.
- Schmitz, B. (2017). "The Role of Effective Communication in Tourism Experiences." *International Journal of Tourism Management*, 32(1), 15-28.
- Sukamto, T. (2021). Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Jakarta: Gramedia Pustaka*.
- United Nations (2023). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Wahyuni, D., & Ardiyani, D. (2020). Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Peningkatan Devisa Negara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 123-130.